

ABSTRAK

Pendaftaran Persekutuan Komanditer berkaitan dengan kredibilitas Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) itu sendiri. Dampaknya jika Persekutuan Komanditer (CV) tidak mendaftarkan ke Sistem SABU bisa dipakai oleh orang lain, sehingga Persekutuan Komanditer (CV) itu sendiri yang akan mengalami kerugian. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata merupakan ketentuan yang baru sehingga masih memerlukan pemahaman bagi notaris dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam pendirian Persekutuan Komanditer (CV). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer. 2) Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendirian Persekutuan Komanditer. 3) Kendala dan solusi Notaris dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam pendirian Persekutuan Komanditer.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris, yakni meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan obyek penelitiannya yakni sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Sumber data primer dari wawancara, sedangkan data sekunder dari studi pustaka. Penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

Adapun hasil penelitian adalah: 1). Prosedur Pendaftaran Persekutuan Komanditer adalah dengan pengajuan nama, ditindaklanjuti dengan pembuatan akta Notaris melakukan pengisian data dan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan format Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara elektronik, bila disetujui oleh Menteri secara online dilanjutkan penerbitan SK pengesahan badan hukum untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon / Notaris. 2) Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendirian Persekutuan Komanditer adalah melakukan pendaftaran pendirian Persekutuan komanditer pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online yaitu SABU. Notaris bertanggungjawab untuk menyimpan segala dokumen dalam pembuatan akta pendirian tersebut. 3). Kendala yang dihadapi Notaris adalah adanya aturan tentang pendaftaran melalui SABU ini relatif masih baru sehingga di lapangan terjadi kendala misalnya banyak notaris yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi dari pemerintah kepada Notaris terkait peraturan yang baru, karena hal itu memegang peranan penting demi kelancaran pelaksanaan peran tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta otentik, khususnya tentang pendaftaran pendirian persekutuan komanditer.

Kata Kunci: Persekutuan Komanditer, Akta Notaris, SABU

ABSTRACT

Business Entity Administration (SABU) itself. The impact is if the Military Alliance (CV) does not register the SABU system can be used by others, so the Military Alliance (CV) itself will suffer losses. Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2018 Concerning the Registration of Joint Fellowship, Firm Fellowship, and Civil Fellowship is a new provision so that it still requires understanding for notaries in carrying out their roles and responsibilities in establishing the Partnership Alliance (CV).

This study aims to examine: 1) Procedure for Establishment of Military Partnership. 2) The role and responsibilities of the Notary in the establishment of a limited partnership. 3) Notary constraints and solutions in carrying out their roles and responsibilities in the establishment of a limited partnership.

This study uses a sociological juridical approach or empirical legal research, which examines law from an external perspective with the object of research that is social attitudes and behavior towards law. Primary data sources from interviews, while secondary data from literature studies. The study was analyzed using descriptive analysis.

The results of the study are: 1). The Komanditer Alliance Registration Procedure is by submitting a name, followed up by making a notarial deed, filling in the data and submitting it to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the format of the Business Administration System (SABU) electronically. then printed by the applicant / Notary himself. 2) The role and responsibility of a Notary Public in the establishment of a limited partnership is to register the establishment of a limited partnership in the Ministry of Law and Human Rights through an online system, namely SABU. The notary is responsible for storing all documents in making the deed of establishment. 3). The obstacle faced by the Notary is that there are relatively new rules regarding registration through SABU so that in the field there are obstacles such as many notaries who are not aware of any changes in the rules and mechanism of registration. The solution that can be done is by socializing from the government to the Notary related to the new regulation, because it plays an important role for the smooth implementation of the role of the notary's responsibility in making authentic deed, especially regarding the registration of the establishment of limited partnership.

Keywords: Komanditer Alliance, Notarial Deed, SABU